

KEBIJAKAN JATIM BERSINAR (JAWA TIMUR BERSIH NARKOBA) MELALUI STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA TIMUR

Falindra Syahla Putri¹, Indah Murti²,

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(syahlalala.lili@gmail.com, indah@untag-sby.ac.id)

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek sosial, kesehatan, dan keamanan di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) berperan penting dalam mendukung program Jatim Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai upaya preventif dan edukatif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis dan mendukung pelaksanaan strategi komunikasi publik Humas BNNP Jatim dalam mengadvokasi kebijakan Jatim Bersinar. Kegiatan dilaksanakan di Kantor BNNP Jawa Timur selama 40 hari, melibatkan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan meninjau efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan program. Hasil menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik berbasis kolaborasi dan edukasi digital efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kesadaran terhadap bahaya narkoba. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan lapangan seperti tes urin, sosialisasi di Kelurahan Balongsari, serta dokumentasi kegiatan penegakan hukum memperlihatkan sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah. Kegiatan ini membuktikan bahwa komunikasi publik yang terarah dan partisipatif mampu memperkuat advokasi kebijakan dan mempercepat terwujudnya lingkungan sosial bersih narkoba di Jawa Timur.

Kata kunci: *Komunikasi publik, Jatim Bersinar, BNNP Jawa Timur, penyalahgunaan narkoba*

ABSTRACT

Drug abuse remains a serious issue that significantly impacts social, health, and security aspects in Indonesia. The East Java National Narcotics Board (BNNP Jatim) plays an essential role in supporting the Jatim Bersinar (Drug-Free East Java) program as a preventive and educational effort to reduce drug abuse. This community service aims to analyze and support the implementation of public communication strategies conducted by the Public Relations Division of BNNP Jatim in advocating the Jatim Bersinar policy. The activity was carried out for 40 days at the BNNP Jatim Office through participatory observation, informal interviews, and field documentation. Data were analyzed using a descriptive qualitative approach to assess the effectiveness of communication in program execution. The results show that collaborative and digital-based public communication strategies effectively increase community engagement and awareness of drug abuse dangers. Student participation in field activities such as urine testing, community outreach in Balongsari Village, and documentation of law enforcement operations demonstrates strong synergy between academia and government agencies. This activity concludes that well-directed and participatory public communication strengthens policy advocacy and accelerates the realization of a drug-free social environment in East Java.

Keywords: *Public communication, Jatim Bersinar, BNNP East Java, drug prevention*

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan salah satu isu global paling kompleks di abad ke-21. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, hingga keamanan suatu negara. Menurut laporan World Drug Report 2023 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sekitar 296 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2021, meningkat 23% dibandingkan satu dekade sebelumnya. Data tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman lintas batas yang membutuhkan kolaborasi internasional. Dalam konteks globalisasi, penyebaran narkoba tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi, tetapi juga karena perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan distribusi dan transaksi narkoba berlangsung secara daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan pendekatan sistemik berbasis edukasi, hukum, dan komunikasi publik yang kuat (Collins et al., 2021).

Secara nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengendalikan penyalahgunaan narkoba. Laporan Kinerja BNN RI Tahun 2023 mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,95% dari jumlah penduduk atau sekitar 3,6 juta jiwa, dengan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,80% (BNN, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk Indonesia, hampir dua di antaranya terpapar penyalahgunaan narkoba. Lebih memprihatinkan lagi, kelompok usia produktif (15–35 tahun) menjadi segmen yang paling rentan karena tingginya rasa ingin tahu, pergaulan bebas, tekanan sosial, serta akses terhadap internet yang luas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ancaman narkoba tidak hanya menyasar kalangan ekonomi rendah, melainkan juga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat perkotaan berpendidikan.

Berbagai kebijakan pemerintah telah diterbitkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020–2024. Kebijakan ini menegaskan pentingnya pendekatan multisektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga media (Runtunuwu, 2025). Program unggulan dari kebijakan ini adalah Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba), yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang bersih dari narkoba melalui edukasi publik, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga non-kementerian memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan tersebut, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2020 kemudian memperkuat pelaksanaan kebijakan ini dengan menekankan strategi pemberdayaan masyarakat anti narkoba berbasis komunitas. Program “Desa/Kelurahan Bersinar” menjadi salah satu bentuk konkret implementasi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan komunikasi publik di tingkat lokal. Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kasus narkoba yang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur tahun 2023, tercatat lebih dari 7.000 kasus narkoba berhasil diungkap di wilayah ini (Ismail Ali, 2023). Surabaya sebagai ibu kota provinsi menjadi titik dengan tingkat kerentanan paling besar karena karakteristiknya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan industri.

Program Jatim Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan implementasi langsung dari kebijakan nasional Indonesia Bersinar yang disesuaikan dengan konteks lokal Jawa Timur. Program ini tidak hanya menekankan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memperkuat upaya preventif

melalui kegiatan komunikasi publik, penyuluhan, pelatihan kader anti-narkoba, serta penguatan jejaring antarinstansi pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam struktur organisasi BNNP Jawa Timur, Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) memegang peranan sentral dalam pelaksanaan program ini. Humas berfungsi sebagai mediator antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat melalui penyebaran informasi, kampanye digital, publikasi kegiatan, dan kolaborasi media (Rizky et al., 2025).

Peran humas dalam konteks kebijakan public menyatakan bahwa komunikasi publik yang efektif dapat membentuk persepsi positif masyarakat terhadap lembaga pemerintah, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik. Humas tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mampu membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat (Hapsari, 2024). Dalam era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi kanal utama dalam menyebarkan pesan kebijakan secara lebih interaktif dan menjangkau khalayak luas. Penelitian Supriyanto (2024) juga mengemukakan bahwa pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah mampu meningkatkan keterlibatan publik dan efektivitas penyuluhan terhadap generasi muda.

Secara konseptual, strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh Humas BNNP Jawa Timur sejalan dengan teori komunikasi Harold D. Lasswell yang menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi dapat dianalisis melalui lima unsur utama (Hindepeya, 2023): *Who says what, in which channel, to whom, and with what effect* dalam konteks strategi komunikasi kebijakan Jatim Bersinar, unsur “*who*” merujuk pada BNNP Jawa Timur sebagai lembaga penyampai pesan; “*says what*” mencakup pesan-pesan edukatif dan preventif tentang bahaya narkoba; “*in which channel*” menekankan pada pemanfaatan media sosial dan publikasi tatap muka; “*to whom*” ditujukan kepada masyarakat Jawa Timur, terutama kalangan muda; sedangkan “*with what effect*” menggambarkan perubahan perilaku dan meningkatnya kesadaran publik terhadap bahaya narkoba.

Dengan demikian, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menganalisis dan mendukung pelaksanaan strategi komunikasi publik Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam advokasi kebijakan Jatim Bersinar (Bersih Narkoba), serta memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat, produktif, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba..

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini termasuk dalam jenis pengabdian partisipatif berbasis edukasi dan advokasi kebijakan publik, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui strategi komunikasi publik Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim). Kegiatan dilaksanakan di Kantor BNNP Jawa Timur, Jalan Sukomanunggal No. 55–56, Surabaya, pada tanggal 14 Juli sampai 5 September 2025 dengan total durasi 40 hari kerja. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Jawa Timur yang menjadi target program Jatim Bersinar (Bersih Narkoba), khususnya pelajar, mahasiswa, dan komunitas muda sebagai kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Populasi dalam kegiatan ini mencakup seluruh peserta dan penerima manfaat kegiatan sosialisasi dan kampanye digital Jatim Bersinar yang dilakukan oleh BNNP Jatim. Dari populasi tersebut, sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yakni pemilihan responden atau data berdasarkan keterlibatan langsung dalam kegiatan komunikasi publik BNNP Jatim. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara informal dengan staf Humas dan

masyarakat peserta kegiatan, serta dokumentasi kegiatan yang mencakup konten publikasi di media sosial (Instagram, TikTok, dan YouTube), press release, dan laporan kegiatan penyuluhan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis proses perencanaan, pelaksanaan, serta hasil dari strategi komunikasi publik yang dijalankan. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan untuk mengidentifikasi efektivitas unsur komunikasi dalam pelaksanaan advokasi kebijakan Jatim Bersinar. Penyajian data dilakukan secara naratif dengan mendeskripsikan hasil observasi dan dokumentasi yang diorganisasikan berdasarkan tahapan kegiatan. Data visual seperti foto kegiatan, tangkapan layar unggahan media sosial, serta statistik interaksi digital digunakan untuk memperkuat deskripsi dan menampilkan keterlibatan publik. Hasil akhir pengabdian dituangkan dalam bentuk laporan magang, artikel pengabdian masyarakat, serta video dokumentasi kegiatan yang menggambarkan sinergi antara mahasiswa, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan Jatim Bersinar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) merupakan bagian dari implementasi kebijakan Jatim Bersinar (Bersih Narkoba). Program ini berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika melalui upaya preventif, edukatif, dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat. Selama masa magang, penulis berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lapangan BNNP Jatim melalui serangkaian aktivitas yang berfokus pada edukasi publik, koordinasi internal, dan tindakan operasional penegakan hukum.

Kegiatan pertama yang diikuti adalah pelaksanaan tes urin massal. Tes ini merupakan bentuk deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, BNNP Jatim bekerja sama dengan instansi pendidikan serta lembaga daerah untuk melaksanakan pemeriksaan secara acak kepada peserta kegiatan. Penulis turut membantu dalam proses administrasi dan dokumentasi pelaksanaan tes urin, termasuk pencatatan hasil, pengumpulan sampel, dan pengawasan teknis oleh petugas medis BNNP Jatim. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kondisi penggunaan narkoba di kalangan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana edukasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga diri dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta karena dilakukan secara persuasif dan profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap BNNP Jatim sebagai lembaga yang peduli terhadap kesehatan masyarakat.



Gambar 1 Membantu Pelaksanaan Tes Urin

Kegiatan kedua adalah rapat internal mengenai program Jatim Bersinar. Rapat ini dilaksanakan di kantor BNNP Jatim sebagai forum koordinasi antara berbagai bidang, khususnya Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Humas, serta Bidang Rehabilitasi. Rapat bertujuan membahas strategi pelaksanaan program Jatim Bersinar di sejumlah wilayah prioritas di Jawa Timur, termasuk penentuan lokasi kegiatan, pelibatan perangkat daerah, dan rencana sosialisasi di masyarakat. Penulis terlibat dalam kegiatan ini untuk memahami mekanisme perumusan kebijakan dan perencanaan operasional di lingkungan instansi pemerintah. Melalui rapat ini, diperoleh wawasan tentang bagaimana sebuah program kebijakan dirancang melalui koordinasi lintas sektor serta bagaimana komunikasi publik digunakan untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat lapangan.



Gambar 2 Rapat Internal Terkait Jatim Bersinar

Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan program Jatim Bersinar di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan Indonesia Bersinar yang diterjemahkan ke dalam program tingkat kelurahan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Balongsari diajak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan lingkungan bersih narkoba. Program meliputi penyuluhan tentang bahaya narkoba, edukasi mengenai peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan zat, dan pelatihan kader masyarakat anti-narkoba. Penulis berperan dalam membantu tim BNNP Jatim mendokumentasikan kegiatan, mendistribusikan bahan sosialisasi, serta berinteraksi dengan warga. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, terutama dari kalangan ibu rumah tangga dan karang taruna. Mereka menyampaikan komitmen untuk menjadikan Balongsari sebagai

kelurahan bersih narkoba. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif dan komunikasi persuasif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.



Gambar 3 Pelaksanaan Terkait Jatim Bersinar Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes

Kegiatan berikutnya adalah pengeledahan di wilayah Mojokerto dalam rangka mewujudkan Jatim Bersinar. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum BNNP Jatim yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dan satuan narkotika setempat. Penulis berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari tim dokumentasi lapangan yang bertugas mencatat jalannya operasi dan mendokumentasikan kegiatan secara visual. Pengeledahan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan prosedur hukum dan keselamatan tim. Dari hasil pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan peredaran gelap narkoba. Melalui kegiatan ini, penulis mendapatkan pemahaman langsung mengenai sinergi antara fungsi pencegahan dan pemberantasan dalam kebijakan narkotika. Kegiatan ini juga memperlihatkan bagaimana strategi “hard approach” (penegakan hukum) dapat berjalan berdampingan dengan “soft approach” (edukasi publik) untuk mewujudkan daerah bersih narkoba.



Gambar 4 Pengeledahan di Mojokerto

Kegiatan terakhir, adalah pertukaran anjing pelacak (K9) antarwilayah untuk membantu operasi pengeledahan narkoba di Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan operasional antar-satuan BNN provinsi. Anjing pelacak (K9) berperan penting dalam menemukan barang bukti narkoba yang disembunyikan di lokasi tertentu. Penulis terlibat dalam kegiatan dokumentasi proses pertukaran K9 serta mempelajari prosedur kerja unit K9 dalam mendeteksi narkotika di lapangan. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana teknologi dan kemampuan hewan terlatih dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mendukung penegakan hukum, sekaligus memperlihatkan sinergi antarinstansi dalam memperkuat pelaksanaan program Jatim Bersinar.



Gambar 4 Pertukaran K9 dalam Membantu Penggeladahan Narkoba di Jatim

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program Jatim Bersinar tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada sinergi antara aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi publik. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap bahaya narkoba. Selain itu, pendekatan langsung ke masyarakat di tingkat kelurahan terbukti lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan komunikasi melalui media massa.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan lingkungan sosial yang bersih dari narkoba. Program Jatim Bersinar yang melibatkan pendekatan multi-sektor dapat dijadikan model strategis dalam implementasi kebijakan publik berbasis partisipasi. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan seperti penyuluhan, tes urin, dan pelibatan masyarakat secara langsung memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap narkoba. Sementara itu, kegiatan penegakan hukum seperti penggeledahan dan penggunaan K9 menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami mekanisme kerja lembaga pemerintah dan strategi komunikasi kebijakan publik. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bagaimana pendekatan edukatif, kolaboratif, dan represif dapat diintegrasikan dalam satu kesatuan strategi untuk mencapai tujuan besar Jatim Bersinar yaitu mewujudkan Jawa Timur yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Hasil Analisis Strategi Komunikasi Publik Humas BNNP Jatim Berdasarkan Model Harold Lasswell

Dalam konteks advokasi kebijakan Jatim Bersinar (Bersih Narkoba), strategi komunikasi publik Humas BNNP Jawa Timur dapat dianalisis menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell, yang menekankan lima unsur utama: Who, Says What, In Which Channel, To Whom, dan With What Effect (Lasswell, 1948 dalam Widiastuti & Haryono, 2020). Model ini relevan untuk menilai efektivitas komunikasi publik pemerintah dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan anti-narkoba.

Tabel 1 Analisis strategi komunikasi

Unsur Model Lasswell	Implementasi oleh Humas BNNP Jawa Timur (Hasil Analisis Peneliti)
Who (Siapa yang menyampaikan)	Humas BNNP Jawa Timur bertindak sebagai pihak yang menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sebagai representasi lembaga pemerintah, Humas memiliki kredibilitas tinggi dalam menyampaikan informasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kebijakan Jatim Bersinar. Keberadaan Humas juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan masyarakat di tingkat daerah.
Says What (Apa yang disampaikan)	Pesan utama yang disampaikan berfokus pada edukasi bahaya narkoba, ajakan menjauhi NAPZA, serta promosi kegiatan Jatim Bersinar (Bersih Narkoba) yang menekankan sinergi masyarakat dan pemerintah. Pesan dikemas dalam bentuk konten visual seperti video pendek, infografis, caption singkat, serta dokumentasi kegiatan lapangan agar lebih mudah dipahami masyarakat.
In Which Channel (Melalui saluran apa)	Saluran komunikasi yang digunakan meliputi media sosial (Instagram, TikTok, dan YouTube), media massa, serta kegiatan langsung seperti penyuluhan, FGD, dan sosialisasi ke sekolah maupun kampus. Media sosial menjadi saluran paling efektif karena mampu menjangkau audiens muda dengan cepat dan interaktif.
To Whom (Kepada siapa)	Sasaran utama komunikasi adalah masyarakat Jawa Timur, khususnya pelajar, mahasiswa, komunitas pemuda, serta masyarakat umum yang menjadi target utama program Jatim Bersinar. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan komunikatif agar pesan dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.
With What Effect (Dengan hasil apa)	Dampak dari strategi komunikasi ini terlihat dari meningkatnya kesadaran publik, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan interaksi digital melalui komentar, likes, dan share di media sosial. Selain itu, muncul pula relawan dan duta anti-narkoba di beberapa daerah yang menjadi bukti keberhasilan advokasi kebijakan Jatim Bersinar.

Sumber : Analisis Penulis

KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup

Kegiatan pengabdian masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur memberikan pengalaman berharga sekaligus kontribusi nyata terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Jatim Bersinar (Bersih Narkoba). Berbagai kegiatan seperti tes urin massal, sosialisasi di Kelurahan Balongsari, rapat kebijakan, hingga pengeledahan dan pertukaran anjing pelacak (K9) menunjukkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara aspek edukatif, preventif, dan represif.

Pelaksanaan kegiatan juga membuktikan bahwa komunikasi publik yang kreatif dan partisipatif mampu memperkuat pesan kebijakan pemerintah mengenai bahaya narkoba. Antusiasme masyarakat dalam kegiatan sosialisasi menegaskan efektivitas pendekatan humanis

dibandingkan pendekatan formal semata. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan pemahaman langsung tentang implementasi kebijakan publik di bidang pemberantasan narkoba serta mengasah peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam memperluas pesan anti-narkoba di masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil magang dan pengamatan di Humas BNNP Jawa Timur, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Kembangkan Konten Digital Interaktif
Membuat kuis, live streaming, atau video edukatif yang melibatkan audiens serta memperbanyak kolaborasi dengan influencer lokal agar pesan anti-narkoba lebih menarik dan mudah diterima.
2. Tingkatkan Kapasitas Tim Humas
Melalui pelatihan rutin di bidang desain, video editing, dan storytelling agar konten lebih kreatif dan komunikatif.
3. Perkuat Evaluasi Dampak Komunikasi
Melakukan survei, memantau engagement media sosial, dan menilai efektivitas pesan untuk memperbaiki strategi komunikasi.
4. Perluas Kolaborasi Lintas Sektor
Menjalin kerja sama dengan sekolah, kampus, komunitas, dan organisasi masyarakat serta membentuk agen informasi anti-narkoba di lingkungan lokal.

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan semangat Jatim Bersinar tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata masyarakat Jawa Timur untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BNN. (2023). *National Survey on Drug Abuse 2023*. 3, 1–212.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Komunikasi Edukasi Tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Miras di Kab. Asahan Ismail*. 4, 167–186.

Hapsari, M. I. (2024). Taktik Komunikasi Efektif dalam Kampanye Lingkungan : Peran Humas dalam Kesadaran dan Aksi Bersama. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 151–157. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/967>

Hindepeya, M. (2023). *SKRIPSI OLEH : NETRIANNI SIPAHUTAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN* Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Oleh : NETRIANNI SI. 73.

Ismail Ali, W. suci ramadhani et. a. (2023). penyuluhan hukum terpaducegah narkoba terhadap generasi muda di SMP SATAP 5 TANASITOLLO. *Jurnal.Lamaddukelleng.Ac.Id*, 1(1), 1–9. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/66%0Ahttps://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/download/66/57>

Rizky, T., Studi, P., Komunikasi, I., Psikologi, F., Ilmu, D. A. N., Budaya, S., & Indonesia, U. I. (2025). *Peran Humas Polres Kota Balikpapan Dalam Menjalankan Aktivitas Media Relations*.

Runtunuwu, Y. B. (2025). Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Negara-negara Asean: Implikasi terhadap Akses Keadilan dan Keberlanjutan Lingkungan. *Collaborative: Journal of Community Service*, 1(2), 62–76. <https://doi.org/10.64924/w7t5fq98>

Supriyanto, D., Nuryanti, & Noegroho, A. (2024). Media Sosial dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 7796–7810.